

**TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI *HASANAH CARD* DI
BNI SYARIAH**

(Studi Pada PT.Bank BNI Syariah KCP Pettarani)



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Strata-1 Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh :

NURWULANDARI.M
NIM. 10200113171

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwulandari.M
NIM : 10200113171
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 November 1995
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Tamalate III No.286
Judul : Kesesuaian Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah
Card (Studi pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2017

Penyusun,

Nurwulandari.M

NIM: 10200113171

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *"Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card (Study Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani)"*, yang disusun oleh **Nurwulandari.M** NIM: **10200113171**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

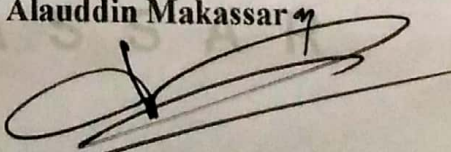
Makassar, 27 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Murtiadi Awaluddin, S.E., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ismawati, SE., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Peneliptian	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-42
A. Teori Masalah	13
B. Teori Perilaku	14
C. Teori Kebutuhan	21
D. Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dan Kartu Kredit Syariah	27
E. Ketentuan Tawidh Menurut Fatwa DSN MUI No: 54/DSN MUI/ X/2006	30
F. Mekanisme Syariah Card.....	31
G. Prinsip Syariah Card dalam Perspektif DSN-MUI.....	34

BAB III METODE PENELITIAN43-53

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Instrumen Penelitian	49
F. Metode dan Analisis Data.....	50
G. Pengujian Keabsahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....54-84

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	54
B. Operasional iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah	60
C. Mekanisme Biaya Tadwidh dan Penetapan Biaya iB Hasanah Card..	65
D. Bentuk Kerjasama BNI Syariah dengan Pihak Provider Mastercard..	71
E. Sudut Pandang Pihak Akademisi dan Regulator Dalam Penerapan Syariah Card di Kota Makassar.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN83-84

DAFTAR PUSTAKA86-89

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card (Studi pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani)”** Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga dan sahabatnya.

Penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda **H. Mahmud** dan Ibunda **Hj. Nikma Husain** serta ke dua saudara penulis **Jusman Mahmud, SS** dan **Sri Sulastri S.pd.,M.Kes**, yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat, memberikan Motivasi, semangat dan ketulusan untaian doa serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.**, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu **Dr. Rahmawati Muin M.Ag.**, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak **Drs. Thamrin Logawali., MH**, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi arahan dan dukungan dari awal studi penulis hingga sekarang.
4. Bapak **Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Ismawati, SE.,M.Si.**, selaku Pembimbing II yang dengan Ikhlas telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, motivasi serta meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf jurusan beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2013, terkhusus Ekonomi Islam D, telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan yang telah memberikan banyak motivasi dalam perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
8. Saudara, Sahabat dan Teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas lain yang ada di UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas doa dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Beserta pihak-pihak yang dengan Ikhlas memberikan dukungan fisik maupun materil.

9. Seluruh teman-teman KKN Reguler Angkatan ke-54 Desa Malleleng, Kec. Kajang, Kabupaten. Bulukumba. Dua bulan merupakan waktu yang sangat berharga bagi hidup saya karena bersama teman-teman yang luar biasa dan tak akan pernah terlupakan. Terima kasih atas candaan, semangat, motivasi, dan kebersamaan.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, November 2017

Penulis,

Nurwulandari.M
NIM: 10200113171

ABSTRAK

NAMA : NUR WULANDARIM
NIM : 10200113171
JURUSAN : Ekonomi Islam
JUDUL : Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card
(Studi pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani)

Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan, yaitu; (1) Bagaimanakah operasional pelaksanaan iB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani ? (2) Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana *tadwidh* atau denda keterlambatan dan penetapan biaya lainnya pada iB Hasanah Card di BNI Syariah KCP Pettarani ? (4) Bagaimana sudut pandang dari pihak praktisi dan regulator dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah di Kota Makassar ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : Pendekatan Interpretif. Informan yang diambil sebanyak 4 orang dalam ruang lingkup yang berbeda diantaranya; (1) Pihak praktisi dalam hal ini pimpinan Bank BNI Syariah dan yang terkait di bidang Syariah Card. (2) Pihak Akademisi yaitu selaku Dosen Keuangan Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (3) Pihak Regulator selaku pihak MUI Kota Makassar (4) Pihak Nasabah selaku pengguna Kartu Kredit. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil temuan dari penelitian, Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya. Pihak tersebut menganggap Syariah Card adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantu mengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding menggunakan uang tunai.

Kata Kunci: *Syariah Card, Biaya Tadwidh, Penetapan Biaya, Provider Master Card*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia saling berhubungan satu sama lain.¹ Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah.²

Hukum asal muamalah berdasarkan ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an atau Sunah”. Yang perlu dilakukan dalam hal muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya QS Al-Maidah/5: 02:

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 11.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
QS Al-Maidah/5: 02.³

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁴

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dimana masyarakatnya selalu mendahulukan nilai-nilai keislaman dalam melaksanakan segala kegiatan kemasyarakatan. Terlebih untuk menjawab permasalahan perekonomian, umat islam memang membutuhkan lembaga keuangan yang berbasis keislaman disamping adanya lembaga keuangan konvensional.⁵

Menanggapi persoalan tersebut diatas mulailah dibentuk suatu lembaga keuangan yakni yang disebut sebagai Bank Syari'ah. Bank secara umum mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau disebut sebagai *financial intermediary*.⁶ Secara spesifik fungsi bank adalah sebagai *agent of trust* yang berarti dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau *trust* baik dalam hal penghimpunan dana

³Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 106

⁴Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj.Zainal Arifin dan Dahlian Husin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

⁵I.V.Z Nurul Ushwa, *“Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah”* 2016, hal 01.

⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2001) hal. 88

maupun penyaluran dana. Bank juga disebut sebagai *agent of development*, yang berarti fungsi bank dalam hal ini adalah memperlancar kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Selanjutnya bank adalah *agent of services*, dalam hal ini bank memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.⁷

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan yang banyak dan beragam, salah satunya adalah keinginan akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut, tanpa mengesampingkan aspek syariah yang menjadi landasan utama dari produk-produk yang dihasilkannya.⁸ Oleh karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat. Untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank dianggap perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.⁹

⁷ Y. Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal. 6

⁸ OJK, <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-haojk-dan-perbankan-syariah-gelar-expo-ib-vaganza-2015>, diakses pada : 22 Juli 2018.

⁹ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung, Refika Aditama 2004) hal.7.

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong bank syariah atau lembaga keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit islami (*islamic credit card*). Bank Berhard Malaysia adalah pelopor kartu kredit islami pertama di dunia dengan meluncurkan *Al Taslif Credit Card* pada tahun 1996. Di Timur Tengah sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu kredit islami dalam lima tahun sejak kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26 % dengan total transaksi 34,7 juta US dollar. Di Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan sampai mencapai 40 %.¹⁰

Dengan dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kartu kredit islami di Timur Tengah dan Malaysia, berkembang pula penerapan kartu kredit di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 serta surat persetujuan Bank Indonesia nomor 10/337 DPbs/2008. Salah satu perusahaan terbesar dan tersohor yang berada di Indonesia yang saat ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan produknya Bank BNI Syariah. Pada tanggal 9 Februari 2008 bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES), BNI Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu iB Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International.¹¹ Sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.¹² Lembaga keuangan ini merupakan perusahaan

¹⁰ (Modal, 1 Juni 2003:9)

¹¹ Desti Silvia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penentuan Biaya (Fee) Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hal 03.

¹² <http://www.bni.co.id.Portals0DocumentPress%20release%20%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind.pdf>, diakses hari Selasa tanggal 05 September 2017

perbankan milik negara yang pertama kali mengusungkan sistem keuangan syariah dan mengeluarkan produk jasa dalam hal ini kartu kredit syariah.

Kartu kredit syariah merupakan yang kedua di Indonesia menyusul, setelah bank swasta yaitu Bank Danamon syariah yang telah menerbitkan Dirham Card lebih dulu pada tanggal 19 Juli 2007. Fenomena menarik tentang syariah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syariah meluncurkan produk syariah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syariah menghentikan penjualan syariah card. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syariah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syariah mengeluarkan produk syariah card populasi pengguna syariah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syariah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna.¹³

Saat ini posisi Bank Danamon Syariah diambil oleh BNI Syariah dengan mengeluarkan produk iB Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2008. Sejak awal diterbitkannya, Syariah Card memang menimbulkan banyak keraguan dan kontroversi para pelaku perbankan syariah. Para bankir masih meragukan apakah Syariah Card sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Lebih dari itu, sebagian pelaku bisnis bank syariah menilai bahwa dari segi manfaat Syariah Card sangat kecil sekali. Bank Muamalat yang sudah murni syariah pun menolak adanya kartu kredit syariah.¹⁴

Daud Bakar, seorang profesor di IIUM Malaysia, berpendapat bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam, karenanya istilah yang paling tepat digunakan

¹³Republika, "Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah", (Senin, 14 Februari 2011), hal. 28.

¹⁴Agus Y. *Danamon Syariah Tepis Kontroversi Syariah Card*, <http://www.google.pk/esintektif.com/>, akses 08 Juni 2018

adalah kartu debit. Pendapat Daud Bakar tersebut meragukan kesyariahan kartu kredit karena dilandasi pada analogi bahwa kartu kredit sama dengan menganjurkan orang untuk berutang. Padahal di dalam Islam, berutang merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan.¹⁵

Menurut Muazammil Siddiqi menggunakan kartu kredit sama seperti menggunakan sistem perbankan modern. Kebanyakan bank modern berbasis riba dan kaum muslim terpaksa menggunakannya karena bank yang bebas riba tidak ada diperbolehkan menggunakan jasa bank- bank demikian tanpa terlibat dalam riba. Dengan cara yang sama, diperbolehkan pula menggunakan kartu kredit tanpa terlibat dalam urusan riba. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam dalam penggunaan jasa ini selama orang tidak menunda-nunda membayar tagihan dan membayar jumlah keseluruhan pada waktunya. Membayar bunga hukumnya haram. Meski begitu, orang diperbolehkan menggunakan kartu kredit sejumlah yang sanggup dibayar ketika tagihan jatuh tempo. Jika seseorang menggunakan kartu kredit untuk meminjam uang dengan bunga atau untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup dibayar pada waktunya. Orang itu memperturutkan diri dalam riba yang diharamkan Islam.¹⁶

Meskipun banyak pakar yang berpendapat tentang kartu kredit, Dewan Syariah Nasional tetap mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit, yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.¹⁷ Didalam fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card terdapat beberapa ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya ta'widh dan denda.

¹⁵ Deno arisandi, *Kartu Kredit Syariah*, <http://kartukreditislam.blogspot.com/> akses 22 Juli 2018

¹⁶ Monzer Kahf dkk, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, (Solo : PT. Aqwa Media Profetika, 2010), hlm. 34.

¹⁷ Azharsyah Ibrahim, *Kredit dalam Hukum Syariah (Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010) hlm, 12.

Dalam iB Hasanah card yang ada di BNI Syariah sendiri ada beberapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya keanggotaan, biaya ganti tadwidh atau keterlambatan. Menurut fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, dalam hal ini mengenai ta'widh biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara ta'widh dengan fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka katagori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram.¹⁸

Di BNI Syariah Kota Makassar juga mengenakan biaya ganti rugi yang juga disebut biaya denda atau ta'widh, ta'wīd dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan nasabah sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung pokok pembayaran, nasabah tersebut juga harus menanggung biaya penagihan ta'wīd. Dan hal ini akan semakin membuat beban nasabah menjadi bertambah. Kemudian ketentuan tentang

¹⁸ Republika, *Ta'widh Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*, <http://www.muamalatbank.com>, diakses 08 Juni 2018

ta'wīd telah dicantumkan dalam akad. besaran nilai ganti rugi (ta'wīd) sudah diketahui diawal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa biaya ta'widh tidak ditentukan berdasarkan biaya rill kebutuhan bank untuk proses penagihan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu. Selain adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan pretek yang terjadi dilapangan, MasterCard, provider yang menjadi partner BNI Syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card juga menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Seperti diketahui bersama, MasterCard merupakan provider kartu kredit konvensional terbesar. Berdasarkan fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah (Studi Kasus pada PT.Bank BNI Syariah KCP Pettarani”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitiannya tentang sejauhmana kesesuaian prinsip syariah dalam aplikasi iB Hasanah Card di BNI Syariah KCP Pettarani Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pembaca terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan fokus pemaknaan yang lebih rinci agar tidak memunculkan penafsiran yang bermakna ganda. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan judul dalam bentuk deskripsi fokus dengan menyederhanakan pemaknaan.

Adapun deskripsi fokus penelitian ini penerapan aplikasi iB Hasanah Card oleh pihak Bni Syariah KCP Pettarani Kota Makassar ditinjau dari prinsip syariahnya. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah dan ketentuan-ketentuan dalam fatwa. Beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada syariah card, yang pertama adalah Riba yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua Israf Tidak adanya batas maksimum/limit pembelian menjadikan nasabah kartu kredit bersifat konsumerisme. Ditambah dengan adanya batas minimum pembayaran menjadikan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pelunasan tagihan kartu kredit. yang ketiga gharar tidak adanya ketentuan objek yang dapat dibayar dengan kartu kredit. Apapun jenis objeknya jika sudah tergabung sebagai merchant dari provider kartu kredit tersebut, maka transaksi dapat dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti di atas tersebut, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah operasional pelaksanaan iB Hasanah Card pada BNI Syariah KCP Pettarani ?
2. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana tadwih atau denda keterlambatan dan penetapan biaya lainnya pada Hasanah Card di BNI Syariah KCP Pettarani Makassar ?
3. Bagaimanakah sudut pandang dari pihak praktisi dan regulator dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah di Kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, kajian mengenai Kartu Kredit atau dalam istilah Perbankan Syariah adalah Hasanah Card, bukan hal yang baru lagi dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis memberikan gambaran beberapa karya atau penelitian yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

Pertama, penelitian yang berhubungan dengan syariah card diantaranya Mahasiswa perguruan tinggi dari Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 yaitu oleh Hidayat Muis dengan judul : Analisis Penerapan fatwa DSN-MUI /vii/2004 tentang ta'widh pada pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Bukopin. Diperoleh kesimpulan dengan hasil penelitian ini *ta'widh* merupakan sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan atas dasar kemaslahatan dan biaya biaya ril yang dikeluarkan oleh bank syariah karena terjadinya proses perpanjangan dalam pembiayaan murabahah akibat dari penundaan pelunasan oleh nasabah debitur. Ta'widh merupakan dana ril yang telah dikeluarkan pihak bank syariah, sehingga dana ganti rugi yang didapat masuk ke dalam pendapatan bank syariah dalam perhitungannya.¹⁹

Penelitian Edi Santoso dengan judul “Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danmon Syariah” Penulis melihat ada beberapa kesulitan yang dihadapi pihak Bank Danamon Syariah selaku penerbit Dirham card yakni, pertama, penentuan persyaratan calon pemegang Dirham Card harus memiliki

¹⁹Hidayat Muis, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI/vii/2004 Tentang Ta'widh pada Pembiayaan mudharabah di PT Syariah Bukopin*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

kartu kredit konvensional sebelumnya. Hal ini membuat Dirham Card sulit diakses oleh kalangan Islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba. Kedua, penetapan besaran ta'widh yang menyamakan semua jenis kartu, menurut penulis tidak mencerminkan aspek keadilan, seharusnya besaran ta'widh dipisahkan menurut limit kartu.²⁰

Penelitian yang lain dilakukan oleh Ganjar Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB hasanah Card BNI Syariah) diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad dalam hasanah card sudah sesuai dengan hukum Islam, karena prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam, hal ini dilihat dari subyek akad dalam Hasanah Card.²¹

Berdasarkan penelusuran studi empiris yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu sama – sama membahas tentang Syariah Card dan penerapan tentang biaya tadwih atau ganti rugi yang mana menggunakan metode kualitatif yang membedakannya adalah penelitian ini membahas kesesuaian prinsip syariah terhadap Aplikasi Hasanah Card di Bni Syariah terkait dalam hal ini biaya Tadwih dan bentuk Kerjasama BNI Sayriah dengan Provider MasterCard, sedangkan peneliti yang terdahulu membahas tentang hukum kartu kredit dalam Islam dan penerapan biaya tadwih dalam akad mudharabah kemudian tentang system Syariah card.

²⁰ Edi Santoso, *Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danmon Syariah*, skripsi S1, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

²¹ Ganjar Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah ditinjau dari segi transaksi dan biaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam memahami ilmu Ekonomi Islam dalam bidang perbankan syariah pada produk pembiayaan terkhusus dalam hal kartu kredit.
- 2) Dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui kesesuaian prinsip syariah terhadap aplikasi hasanah card di BNI Syariah khususnya.

b. Bagi Peneliti lain

- 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lanjutan, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penerapan Hasanah Card.
- 2) Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi peneliti yang ingin menganalisa sebuah fenomena yang memiliki kemiripan dengan kasus yang peneliti angkat pada tulisan ini

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Masalah

Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap mashlahah yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.²²

Ahli hukum terkemuka, Mustafa Zaid menyatakan bahwa, para ulama *nahwu* dan *sharaf* (gramatika bahasa Arab), menetapkan bahwa kata mashlahah sepadan dengan kata *maf'alah* yang berasal dari kata *sulhu* yang berarti hal yang baik. Dikatakan pula bahwa mashlahah itu mengandung pengertian “kelezatan” dan “hal yang dapat membawa pada kelezatan”, sedang kata *mafsadah* artinya “kerusakan” dan “hal yang dapat membawa pada kerusakan”. Karena itu, Mustafa Zaid menyimpulkan bahwa, keduanya mencakup arti jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi.²³

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan

²² Enden Haetami, “Perkembangan Teori Masalah” Izzu al-Din Bin Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *Asy-Syari'ah* 17, No.1, (April 2015), h.29

²³ Hasnan Bachtiar, “Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam”, *Ulumuddin* 4, (Januari-Juni 2009), h.279

kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁴

B. Teori Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. Secara umum perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Namun dari arti lain perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya.

Akan tetapi perilaku dalam penelitian ini berkaitan dalam hal perilaku konsumsi masyarakat, yang mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan semakin meningkat, perubahan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan akan pembelian produk barang atau jasa tersebut, meskipun dana yang mereka miliki tidaklah cukup untuk memenuhi barang atau jasa yang ingin mereka peroleh.²⁵

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, “*Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*”, *Istinbath* 12, No.1. (Desember 2013), h.291

²⁵ Dahar, Pengertian Perilaku, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku-konsep.html>, diakses 20 September 2017

Makna perilaku sendiri sangat sulit untuk dipahami karena perilaku menyangkut bidang psikologi. Perilaku seseorangpun, biasanya sangat mudah terpengaruh terutama dalam perilaku pengeluaran atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang di pengaruhi oleh beberapa faktor secara umumnya. Berdasarkan niat ataupun manfaat dari sikap seseorang akan sangat berpengaruh baik dari niat, karena dalam masyarakat yang beragama, niat perilaku untuk meyakini suatu hal yang baru akan lebih memikirkankarena menyangkut pengetahuan.²⁶

Pada intinya dapat dikatakan bahwa motif-motif atau kebutuhan merupakan penyebab terjadinya “tindakan-tindakan”. Kekuatan motif merupakan alasan yang melandasi perilaku, kekuatan motif cenderung menyusut, apabila ia terpenuhi atau apabila terhalangi. Sebelum terbentuknya suatu pola perilaku, seseorang memiliki bentuk sikap dari suatu rangsangan yang datang dari luar dalam bentuk aktivitas, kemudian dari sikap tersebut terbentuklah perilaku (*behavior*). Sikap individu tersebut dalam bentuk pikiran dan perasaan yang tidak kasat mata membentuk pola perilaku masyarakat sebagai perilaku yang tampak perilaku yang tidak tampak dan perilaku yang tampak. Menurut Sarwono menyebutkan aspek-aspek pikiran yang tidak kasat mata dapat berupa pandangan, sikap, pendapat dan sebagainya. Bentuk kedua adalah perilaku yang tampak yang biasanya berupa aktifitas motoris seperti berpidato mendengar dan sebagainya. Sedangkan perilaku sendiri berhubungan dengan konsumen di mana saling melengkapi karena konsumen merupakan pengguna dari sebuah kegiatan.²⁷

2. Teori Perilaku Konsumen Konvensional

²⁶Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1994), h. 25.

²⁷Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta,2007), h. 34.

Teori ekonomi perilaku konsumen, yang biasanya hanya disingkat teori konsumen yang menerangkan perilaku konsumen dalam membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh alat-alat pemuas kebutuhan, yang dapat berupa barang-barang dan konsumsi ataupun jasa-jasa konsumsi. Fungsi utama barang dan konsumsi adalah umumnya adalah rumah tangga keluarga. Dalam kedudukannya sebagai barang-barang dan jasa-jasa konsumsi mereka disebut konsumen.²⁸

Perilaku konsumen (*consumer behavior*) merupakan “tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.”²⁹

Semua hal yang penting dalam perilaku konsumen adalah bahwa seorang konsumen selalu dianggap sebagai manusia yang rasional. *Rasionality* didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memaksimalkan keputusan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan keputusan mereka. Asumsi dasar tentang perilaku seorang konsumen yaitu: memaksimumkan kepuasannya, kesejahteraan, kemakmurannya atau kegunaannya dan berusaha mencapainya.³⁰

Dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan konsumen dari kegiatan konsumsinya adalah memaksimumkan kepuasan materiil. Hal ini berarti dalam teori konvensional diajarkan bahwa tujuan konsumsi adalah mencari *utility* maksimum, di

²⁸Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2002), h. 143.

²⁹Sutisna, *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003), cet. Ke-3, h. 5.

³⁰Muhammad, *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), h. 188.21

mana tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditi akan mencapai titik maksimum apabila ia memilih barang yang paling disenanginya, memiliki barang lebih banyak dari pada memiliki sedikit barang (*more is better*) serta menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. teori tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa agar konsumen mencapai tujuannya (*maximum utility*), di mana tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditi akan mencapai titik maksimum apabila ia memilih barang yang paling disenanginya, memiliki barang yang lebih banyak baik dari pada memiliki sedikit (*more is better*) serta dapat menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki. Dengan kesimpulan ini jelaslah bahwa yang di maksud kepuasan dalam ilmu ekonomi konvensional adalah kepuasan yang bersifat materiil.

3. Teori Perilaku Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslāhah maksimum. Konsumsi dalam Islam dibedakan atas konsumsi duniawi, yaitu konsumsi untuk pemenuhan jasmani dan rohani. Konsumsi akhirat, yaitu konsumsi untuk kepentingan ibadah termasuk ibadah yang berdimensi sosial seperti pengeluaran sedekah, infak, zakat dan wakaf.

Sesuai dengan rasional Islami bahwa setiap perilaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslāhah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah SWT. Maslāhah adalah suatu yang dapat memberikan keputusan karena kandungan maslāhah adalah terdiri dari manfaat dan berkah.

Perilaku konsumen Muslim dalam hal ini yaitu, seorang konsumen akan mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material. Di sisi lain, berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.³¹

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya:

- 1) Prinsip syariah menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (a) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta. (b) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. (c) Prinsip amaliyah, sebagai konsekuensi aqidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 129.

- 2) Prinsip kuantitas sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadzir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
- 3) Prinsip prioritas memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: (a) primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok; (b) sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan; (c) tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.
- 4) Prinsip sosial memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (a) kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf; (b) keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi baik

dalam keluarga atau masyarakat; dan (c) tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan seperti mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya.

- 5) Kaidah lingkungan dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah³²

Utilitas bukan sesuatu yang bertentangan dengan maslāhah bahkan dalam Islam seorang Muslim juga harus rasional. Namun, utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka tetapi juga di batasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan. Seseorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam kegiatan konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Kaidah yang dapat diacu sebagai pedoman dalam berkonsumsi adalah (Q.S Al-Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ ۝ ٦٧

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S Al-Furqan(25):67)³³

³²Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari, (Jakarta: 2010), 182-185.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 365.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang untuk mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang kita harapkan bukan berdasarkan apa yang dikonsumsi melainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yaitu dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.³⁴

C. Teori Kebutuhan

1. Pengertian Kebutuhan

Secara umum yang dimaksud dengan kebutuhan adalah suatu keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa.³⁵ Dengan pengertian lain kebutuhan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk barang dan jasa untuk mensejahterkan hidupnya.

Kebutuhan setiap manusia sangat beragam dan tidak terbatas jumlahnya. Karena itu sudah menjadi kodrat atau hakekat dari manusia yang akan selalu merasa kekurangan, tidak akan pernah merasa puas. Setelah salah satu kebutuhannya terpenuhi akan muncul keinginan-keinginan lain dalam diri manusia. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.

Menurut Islam semua barang dan jasa yang mempunyai masalah dikatakan sebagai kebutuhan. Masalah ialah kepemilikan atau kekuatan barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini

³⁴Mustafa Edwain Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 68

³⁵Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 5.

dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.³⁶ Jadi tidak hanya kebutuhan akan duniawi saja, dalam Islam suatu kebutuhan itu sejalan dengan tujuan hidup untuk memperoleh pahala guna kehidupan di akhirat.

Abraham Maslow, salah seorang tokoh perkembangan psikologi humanistik, mengembangkan model Hierarki kebutuhan (1950) dan teori Hierarki Kebutuhan sampai saat ini tetap digunakan dalam memahami motivasi manusia yang dikenal dengan *Maslow's Needs Hierarchy Theory A Theory of Human Motivation*. Maslow menyusun hirarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan 5 biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan menjadi penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.³⁷ Menurut Maslow seorang yang berperilaku atau bekerja karena didorong oleh berbagai jenis kebutuhan, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Jika kebutuhan pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka kebutuhan ketiga dan seterusnya sampai tingkat kelima.³⁸

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu :

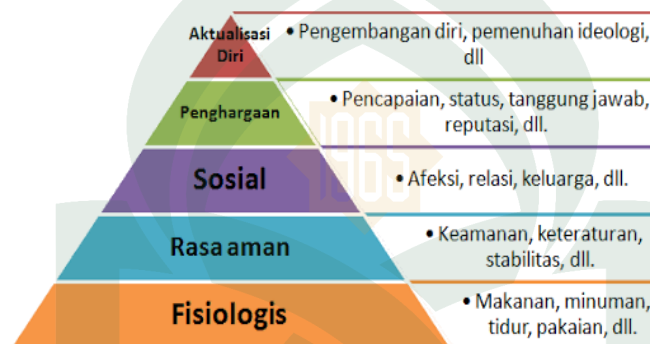
1. kebutuhan fisiologikal (*physiological needs*), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan *sex*;
2. kebutuhan rasa aman (*safety needs*), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual;
3. kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*);

³⁶Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 5.

³⁷Rita L. Atkinson & Richard C Atkison, *Pengantar Psikologi* (Jakarta:Erlangga, 1982), h.54.

³⁸ Sarlito W. Sarwono. *Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) h.174-178

4. kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan
5. aktualisasi diri (*self actualization*), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.



Sumber: doriasriwijaya – WordPress.com

2. Secara Umum

Secara garis besar kebutuhan dibedakan menjadi empat bagian, yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitas, sifat, subjek, dan waktunya.

a. Kebutuhan menurut tingkat intensitas

Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kebutuhan primer, yaitu jenis kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, makan, minum, rumah, dan pakaian.
- 2) Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya seperti kendaraan, kipas

angin, meja, kursi, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan kenyamanannya.

- 3) Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang sifatnya mewah. Walaupun sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder, sifat manusia selalu ingin mempunyai yang lebih. Contohnya, mobil, kapal pesiar, dan barang mewah lainnya yang dapat meningkatkan status sosialnya.

b. Kebutuhan menurut sifat

- 1) Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Seperti pakaian, makanan, dan minuman.
- 2) Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik.

c. Kebutuhan menurut subjek

- 1) Kebutuhan individual, yaitu kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Misalnya guru membutuhkan kapur tulis atau spidol, petani membutuhkan cangkul.
- 2) Kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang dapat digunakan oleh semua orang atau diperuntukkan untuk umum. Contohnya, jembatan penyeberangan dapat digunakan semua orang untuk menyeberang.

d. Kebutuhan menurut waktu

- 1) Kebutuhan sekarang.
- 2) Kebutuhan yang akan datang.³⁹

³⁹Makalah Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi Oleh Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih

3. Kebutuhan Menurut Islam (Maslahah)

Menurut Syatibi, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Kebutuhan Dharuriyyah

Daruriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan dharuriyyah dalam pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contoh kebutuhan dharuriyyah :

- 1) Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga: pangan, sandang, papan dan kesehatan
- 2) Pengeluaran untuk keagamaan: pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam.
- 3) Pengeluaran untuk memelihara akal: pengeluaran untuk pendidikan
- 4) Pengeluaran untuk memelihara kehormatan: pengeluaran untuk biaya perkawinan dan sejenisnya
- 5) Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli brankas-brankas yang cocok untuk menyimpan harta.⁴⁰

b. Kebutuhan Hajiyah

Kebutuhan ini maksudnya untuk memudahkan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Pada dasarnya jenjang hajiyah ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyyah. Atau lebih

⁴⁰Muhammad, *Ekonomi Mikro...*, hal. 20.

spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.⁴¹

c. Kebutuhan Tahsiniyah

Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik. Secara lebih spesifik tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan atau bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Barang kebutuhan ini berhubungan dengan hadits nabi:

“Diantara kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan rumah yang luas” (HR.Ahmad).

Contoh barang kebutuhan tahsiniyah:

- 1) Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara’
- 2) Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah.
- 3) Pengeluaran untuk memperindah rumah.

Daruriyyah wajib dipelihara. Hajiyyah boleh ditinggalkan apabila memelihara ya merusak hukum dharuriyyah, dan tahsiniyah boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum dharuriyyah dan hajiyyah. Jadi, secara umum barang dan

⁴¹Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Kencana, 2014) , hal. 68.

jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi kelima elemen pokok (dharuriyah) telah dapat dikatakan memiliki Masalah bagi umat manusia.⁴²

D. Pengertian Kartu Kredit Syariah dan Perbedaannya dengan Kartu Kredit Konvensional

Syariah berasal dari kata yang berarti syariat, ajaran, undang – undang, hukum.⁴³ Syariah juga berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminology, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan pada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.⁴⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.⁴⁵ Berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dimaksud dengan kartu kredit syariah (syariah card) adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini.⁴⁶

⁴²Muhammad, *Ekonomi Mikro*. hal. 20.

⁴³Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus AlMaurid*, (Surabaya: Halim Jaya, 2006), h. 509

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.7.

⁴⁵Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, hal. 1 10

⁴⁶Sutan Rey Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal. 458

Sedangkan yang dimaksud dengan kartu kredit atau kredit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁷ Atau istilah lain Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi perbelanjaan/atau untuk melakukan tarik tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*Charge card*) maupun secara angsuran.⁴⁸

Walaupun berdasarkan definisi diatas syariah card berfungsi seperti kartu kredit, tetapi pada syariah card tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, pada syariah card menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam syariah adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Didalam syariah card juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dwabith wa hudud*), yakni tidak menimbulkan riba; tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; pemegang kartu harus

⁴⁷Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal.11

⁴⁸ Sutan Rey Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal. 448

memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.⁴⁹

Landasan penerbitan kartu kredit syariah yang dijadikan sebagai acuan umum diantaranya sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah/5: 01 yang berbunyi sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”(QS.Al-Maidah/5: 1).*⁵⁰

2. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah/5: 2)*⁵¹

Ayat Al-Qur'an ini adalah untuk mengajak saudara sesama muslim untuk mengerjakan perbuatan halal dan menghindari perbuatan dosa yaitu perbuatan memakan riba. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi syariah card sama dengan kartu kredit. Walaupun demikian, antara syariah card dengan kartu kredit terdapat perbedaan mendasar, yakni pada kartu kredit

⁴⁹Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, hal. 2

⁵⁰Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 106

⁵¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 106

menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut tetapi pada syariah card hubungan transaksi berdasarkan akad, yaitu akad kafalah, ijarah, serta qardh. .

E. Ketentuan Tadwih Menurut Fatwa DSN MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006

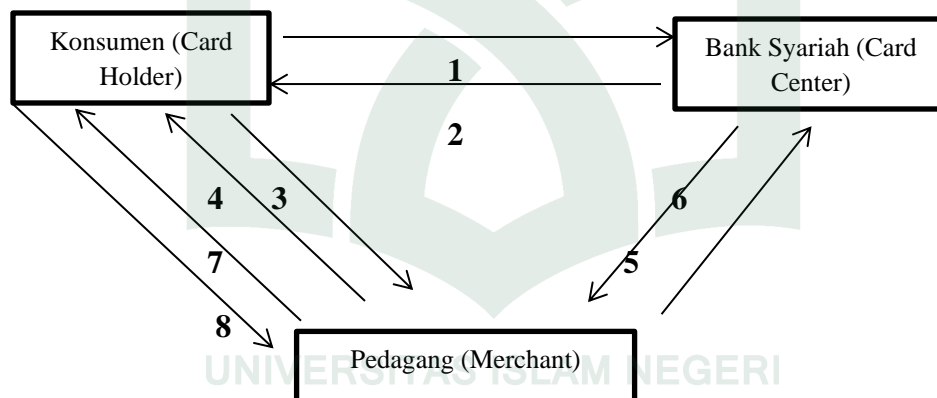
Mengenai kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan NO: 54/DSN-MUI/X/2006 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adhai'ah*).
5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudhrabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian

keuntungannya jelas tetapi tidak dibayarkan. Ketentuan khusus pada fatwa tentang ta'widh adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi dalam LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

F. Mekanisme Syariah Card



Gambar 2.1 Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah
Sumber : Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila terhadap disetujui (setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah), kemudian diserahkan ke nasabah.
3. Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut :

1. Card holder memakai kartunya dalam berbelanja kepada merchant, ia mendapatkan sales draft sejumlah pembeliannya itu.
2. Merchant memberikan sales draft itu pada bank merchant, lalu pembayaran kepada merchant langsung dilakukan oleh bank tersebut. Di samping itu juga ditentukan komisi bank merchant yang disepakati keduanya.
3. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan kepada card holder berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
4. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pihak pedagang (*merchant*) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.

7. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk ribhi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.⁵²

Demikian pula jika yang terjadi adalah pembelian jasa, maka prosesnya adalah sama, hanya saja margin yang diperoleh dinamakan ujah. Permasalahan yang mungkin muncul, sebagaimana dalam bentuk skim murabahah dalam mekanisme perbankan syariah adalah seberapa besar margin ditetapkan oleh bank. Indikasi adanya kecenderungan bank syariah untuk mengambil margin dengan benchmark tingkat bunga rata-rata kredit konsumsi bank konvensional masih banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya. Untuk mengatasi masalah margin, maka mekanisme yang dipilih dapat dilakukan melalui skim bai bitsaman ajil. Skim ini memiliki mekanisme hampir sama, perbedaannya adalah dalam pembayaran nasabah pemegang kartu kepada penyedia kartu (bank syariah) dengan melalui cicilan, sehingga ribhi yang diambil oleh penyedia kartu adalah atas biaya tangguh akibat cicilan. Meski dengan prinsip bat pertanyaan tentang wakalah masih belum terjawab dan masih diperdebatkan dikalangan ulama dan dewan syariah di Indonesia.

Adapun hubungan dengan card taker (*Master Card*) dengan bank lokal yang menerbitkan kartu adalah sesuai dengan perjanjian yang mengatur pembagian kerja dan pembagian keuntungan di antara mereka. Sebagai seseorang yang diberi kuasa

⁵² Sumber : Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

untuk menggunakan kartu kredit dan berkewajiban untuk melunasi segala bentuk kewajiban sebagai akibat dari pemakaian kartu kredit, ada beberapa hal yang perlu dan wajib untuk diperhatikan oleh card holder yang dicantumkan dalam kesepakatan. diantaranya adalah :

1. Didalamnya disebutkan berapa yang harus dibayar untuk biaya pajak dan sebagainya.
2. Hak dan kewajiban yang ditekankan dalam perjanjian dan hal-hal lain yang harus ditunaikan oleh card holder ;
3. Limit nominal yang diberikan oleh issuer card untuk penarikan uang secara tunai dan card holder menyiapkan laporan rutinnya ;
4. Syarat-syarat yang diminta oleh issuer card kepada card holder ketika terjadi kegagalan perjanjian dan tidak terpenuhinya poin-poin dalam kesepakatan tersebut.

G. Prinsip Syariah Card dalam Perspektif DSN-MUI

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada syariah card akan tetap terjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang syariah card pada ketentuan tentang batasan (*Dhawabith WaHudud*). Yang pertama adalah tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan *interest* (*bunga sedikit*) atau usurnya (*bunga yang banyak*).

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena

pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implicit dijelaskan pada QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ إِلَّا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).

Penting dicatat, ayat tersebut merupakan bagian dari ayat-ayat Makiyyah. Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surat Ar-Rum yang termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah itu mempunyai sebuah indikasi mengenai betapa pentingnya masalah riba ini. Mayoritas ahli tafsir (*jumhur al-mufasssirin*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al-athiyyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Bila dicermati ayat 39 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena

itu para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut.⁵³

Yang kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisaa" ayat 160-161 yang artinya : "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (An-Nisaa": 160-161). Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.⁵⁴

Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka, antara lain karena tiga alasan yang tercantum dalam ayat 160-161 surat An-Nisa yakni, (1) banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, (2) memakan riba, padahal mereka dilarang memakannya, dan (3) memakan harta orang lain dengan cara bathil. Kembali pada riba. Akan tetapi mereka justru mempraktekannya dengan berbagai cara. Salah satunya, meminjamkan uang kepada selain mereka dengan cara ribawi.

⁵³Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Makalah yang Belum Dipublikasikan, hal. 3

⁵⁴Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Makalah yang Belum Dipublikasikan, hal. 5

Keharaman riba sudah diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surat Ali-Imran, yang berbunyi sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَفُ ۙ مُّضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۙ ۱۳۰

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Dalam menafsirkan penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi *adh'afan mudha'afah*, dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya sedikit saja hukumnya halal. Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi, *adh'afanmudha'afah*, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba.⁵⁵ Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural, seiring berjalannya waktu, riba yang sedikit itu, lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga. Bila pendapat Sayyid Quthb ini diterima, maka riba itu tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja maupun dalam kadar yang berlipat ganda.

Yang terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba)

⁵⁵<http://riuisme.wordpress.com> diakses tanggal 08 Agustus 2018

maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianaya.” (Q.S. Al-Baqarah/23 : 278-279).

Ayat ini merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut paling sedikit berisi tentang penjelasan tentang dampak negatif dari riba, yaitu :

1. Riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan. Sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang bathil, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang jelas-jelas haram.
2. Dalam riba terdapat unsur dzulm (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual beli. Karena itu jual beli halal, sementara riba haram dilakukan.
3. Pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi di dalam neraka.⁵⁶

Praktek riba terjadi pada kartu kredit konvensional. Apabila card holder tidak dapat melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka card holder wajib membayar jumlah tagihan yang ditambahkan dengan bunga berdasarkan perjanjian, dan bunga tersebut akan berlipat terus menerus apabila card holder tidak melunasi kewajibannya di bulan yang mendatang. Lain hal apabila card holder dapat melunasi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka card holder tidak dikenakan bunga. Berbeda dengan ketentuan pada syariah card. Pada syariah card terdapat biaya yang disebut dengan biaya tawidh. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (*ta'widh*) memutuskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari

⁵⁶Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an*, Makalah yang Belum Dipublikasikan, hal. 12

ketentuan akad dan menimbulkan kerugian lain dan kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dalam dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportubity loss* atau *al-furshah aldhai'ah*). Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Perbedaan antara bunga dengan biaya *ta'widh* adalah sebagai berikut, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang/kredit (*alqard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan biaya *ta'widh* adalah ganti rugi yang bertujuan untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan yang hanya boleh dikenakan atas pihak yang disengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Prinsip yang kedua adalah tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dikatakan dengan tidak adanya transaksi yang bersifat *gharar*. Lafal *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli suatu objek akad yang tidak diyakini dapat diserahkan.

Dalam penjabaran konsep adil yang dilakukan oleh Suwailem (1999) dan dikembangkan oleh Karim (2000), salah satu komponennya adalah tidak boleh *gharar* atau dalam istilah ekonominya disebut *uncertainty with zero sum game*. Karena *gharar* berarti dzalim pada salah satu pihak pelaku transaksi. Karena dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Secara garis besar *gharar* dibagi menjadi 2 (dua) bagian pokok, yaitu *gharar* dalam *sighat* akad dan *gharar* dalam objek akad. *Gharar* dalam objek akad meliputi salah satunya adalah ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*). Untuk itu para ahli Fiqih sepakat, bahwa mengetahui jenis obyek transaksi merupakan syarat sahnya jual beli. Ketidakjelasan obyek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidak jelasan atas jenisnya.

Dalam beberapa literatur fiqih disebutkan tentang disyaratkannya menyebutkan macam dari obyek transaksi (secara jelas) agar akadnya menjadi sah, dan sebagian yang lain dengan menyebutkan sifat atau karakter dari obyek transaksinya. Jenis *gharar* ditinjau peristiwanya adalah :

1. Jual beli barang yang belum ada.
2. Jual beli tidak jelas, baik mutlak pada barangnya, jenis maupun sifatnya.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

Ulama bermadzhab Syafi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat, karakter dan jenis transaksi agar transaksi tersebut menjadi sah:

1. Tidak sah suatu transaksi jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya.

2. Tidak sah suatu transaksi jual beli sehingga disebutkan sifat sifat dan karakter komoditi yang dikehendaki.
3. Keabsahan jual beli dengan tanpa penyebutan sifat dan karakter komoditi dapat terjadi asalkan mekanisme *khiyar ru'yah* (masa pilihan dengan melihat komoditi) masih berlaku bagi pembeli.

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram. Lain hal dengan yang terjadi pada syariah card. Hanya pada produk-produk yang halal saja syariah card dapat dipergunakan. Prinsip yang ketiga adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme atau israf. Menurut bahasa, israf adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Israf juga berarti berlebih-lebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, israf berarti melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Allah berfirman dalam (QS Al-Isra'/17: 27) mengenai pelarangan israf sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝١٧

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra'/17: 27).⁵⁷

Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga card holder dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Akan tetapi kartu kredit syariah menetapkan batas minimum pembayaran setiap

⁵⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 284

jangka waktunya, sehingga tidak mendorong nasabah menjadi konsumtif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PRINSIP	DESKRIPSI
Riba	Adanya Bunga apabila card holder tidak dapat melunasi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan maka card holder wajib membayar tagihan yang telah ditambahkan dengan bunga. Dan bunga akan bertambah terus menerus apabila card holder tidak dapat melunasi kewajibannya di jangka waktu berikutnya.
Israf	Tidak adanya batas maksimum/limit pembelian menjadikan nasabah kartu kredit bersifat konsumerisme. Ditambah dengan adanya batas minimum pembayaran menjadikan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pelunasan tagihan kartu kredit.
Gharar	Tidak adanya ketentuan objek yang dapat dibayar dengan kartu kredit. Apapun jenis objeknya jika sudah tergabung sebagai merchant dari provider kartu kredit tersebut, maka transaksi dapat dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Walaupun berjenis penelitian deskripsi namun studi ini tidak hanya mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh, lebih dari itu data diinterpretasikan agar menjadi wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis, dan teoritis.⁵⁸ Dimana penelitian kualitatif berdasar pada fenomena atau realitas sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang *holistic*, kompleks dan rinci.⁵⁹ Denzim dan Lincoln mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam setting alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran, pada fenomena yang dilihat.⁶⁰ Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti. Hal ini karena, penelitian kualitatif dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti, bukan dalam bentuk statistik yang berkenaan dengan pengukuran sesuatu, seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan mengutamakan penilaian system.

⁵⁸Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*. (Bandung: Tarsito. 1982) Hal 139

⁵⁹Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE. 2013)

⁶⁰Denzim dan Lincoln. (ed), *Hand Book of Qualitative Research, Sage Publication*. (Thousan oaks, London. 1994) hal-32

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengeksplor tanggapan mengenai praktik kartu kredit syariah dalam hal ini aplikasi iB Hasanah Card dari berbagai sudut pandang sehingga dikatakan penelitian ini adalah penelitian multidimensi perspektif, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kiprah kartu kredit syariah di dukung karena fatwa DSN-MUI dan pihak perbankan yang membolehkan dan mengeluarkan konsep syariah card akan tetapi menjadi hal yang simpang siur kesyariahannya. Hal ini menjadi motivasi penulis untuk menilik kesesuaian prinsip syariah pada praktik aplikasi iB Hasanah Card dengan mengumpulkan berbagai macam pandangan yang berbeda dari sumber yang berbea. Penelitian ini nantinya akan dilakukan pada 3 tataran objek yang berbeda dengan kualifikasi yang memadai dengan keilmuan mengenai ekonomi islam yang mumpuni yakni praktisi dalam hal ini adalah pihak dari Bank BNI Syariah Capem Pettarani Makassar, akademisi, dan pihak DPS atau ulama.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif dalam hal ini adalah melakukan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena praktik syariah card ini dengan menganalisa alasan-alasan yang melatar belakang fenomena tersebut. Dengan imbuhan melakukan eksplorasi terhadap kesesuaian prinsip syariah card dari berbagai sudut pandang perspektif hingga hasil penelitian-penelitian akan memuat pandangan-pandangan tentang syariah card secara multidimensi.

Pendekatan interpretatif berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya

dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka.⁶¹ Manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretatif tidak lain adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial itu terbentuk (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Chairi 2009). Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyalami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretatif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin hal ini memungkinkan terjadinya *trade-off* antara objektivitas dan kedalaman temuan penelitian (Efferin et al, 2004 dalam Chariri 2009)

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:⁶²

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih atau subyek penelitian, terkait hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Data primer dapat berupa kata-kata, serta pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama interpretasi data.

⁶¹Ghozali dan Chariri. Teori Akuntansi. (Semarang. Badan Penerbit: UNDIP. 2017)

Maka dari itu, peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada informan terkait pandangan mereka mengenai fenomena praktik syariah card dan dampaknya bagi berbagai kalangan salah satu diantaranya adalah nasabah.

2.Data sekunder

Data sekunder adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh, lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.⁶³

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung yang diperoleh melalui media tertulis yang relevan sehingga memungkinkan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Data-data sekunder digunakan pada hasil penelitian, literature, peraturan dan perundang-undangan/regulasi DSN-MUI, artikel, serta situs internet yang berkenaan dengan praktik syariah card serta dampak praktik tersebut.

Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian ini adalah informan, penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan bukan jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini. Informan penelitian tersebut di atas dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu,

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.⁶⁴ Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kapabilitas masing-masing informan ekonomi islam tentang prinsip-prinsip syariah, dan praktik syariah card yang ada. Informan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan kebutuhan data yang ingin dicapai yaitu dengan memilih informan dalam 3 lini profesi yang berbeda yaitu dari praktisi, akademisi, dan auditor. Alasan mengapa peneliti memilih 2 sumber informan dari masing-masing peneliti dimaksudkan agar hasil penelitian memberikan informasi yang beragam mengenai kiprah praktik syariah card dan dampak yang ditimbulkan. Perbedaan ruang kerja dan pola kerja masing-masing profesi dimungkinkan dapat membuat pemahaman dan pengetahuan sehingga disinyalir informasi yang beragam dapat diperoleh dari tiap informan. Hal ini disebabkan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menggali kesesuaian prinsip syariah pada praktik syariah card dari berbagai macam sudut pandang sehingga lingkungan kerja yang berbeda dari tiap-tiap informan diharapkan dapat memenuhi informasi yang diinginkan.

Penelitian ini memilih 4 informan dengan background lingkungan kerja berbeda, informan yang terdiri dari 2 lini yang berbeda ini di pilih berdasarkan kebutuhan yang dirasa mampu memberi informasi yang dibutuhkan peneliti. Yaitu,

⁶⁴ Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013) Hal. 54

praktisi dalam hal ini pihak pimpinan Bank BNI Syariah Capem Pettarani, dan akademisi dalam hal ini dosen yang mendalami ilmu tentang ekonomi islam atau hal yang berkaitan tentang prinsip syariah.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara; *editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh tertama dari segi kelengkapan, perubahan peraturan atau regulasi. Dan kejelasan serta keselarasan maka antara satu dan lainnya, *organizing* yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan da penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah

2. Wawancara Mendalam

⁶⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, (cet. IV: Jakarta PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti terlibat langsung dengan narasumber sebagai pemberi informasi serta konfirmasi dalam penelitian ini. Dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi

4. *Internet Searching*

Selain melalui studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagai bahan acuan yang mendukung kelengkapan referensi penulis dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Perekam suara
2. Handphone
3. Alat tulis
4. Daftar pertanyaan wawancara

5. Buku, jurnal, dan referensi lainnya

F. Metode dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:⁶⁶

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topic dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat retitive atau tumpang tindih
4. Reduksi data (data Reduction), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.

Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan secara naratif.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.⁶⁷ Uji keabshan data dalam penelitian

⁶⁶Neuman, W.Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. (Jakarta: PT. Indeks. 2013)Hal 14-15

kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *comfirmability* (obyektivitas). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 3 uji yang paling sesuai, yaitu uji *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), dan *dependability* (reabilitas).⁶⁸

1. Uji *Creadibility* (validitas internal)

Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Rahadjo (2010) adalah gaungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Denkin dalam Rahardjo (2010) triangulasi meliputi 4 hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antara peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan 2 dari 4 jenis triangulasi untuk menyelaraskan penelitian ini yaitu :

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau

⁶⁷Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Mizan Publika.2011)

⁶⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2013)
Hal 230

tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

- b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

2. Uji *Dependabilitas* (Reabilitas)

Uji *Dependabilitas* (reabilitas) data menjadi pertimbangan menilai keilmian suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian yang lain akan membuat kesimpulan yang sama dalam perspektif, data mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan, suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi mereplikasi proses penelitian tersebut.⁶⁹ Untuk pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan

⁶⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal 230

proses penelitian, caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan. Dalam situasi lain.⁷⁰ Uji ini dilakukan dengan membuat hasil penelitian atau laporan atas penelitian dengan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca jadi jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat menentukan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.



⁷⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
Hal 276-277

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Bank BNI Syariah berdiri pada tahun 2000 yang terbentuk secara mandiri melalui tim proyek internal tanpa bantuan konsultan. Pola yang digunakan BNI untuk masuk ke dalam pasar perbankan syariah adalah *dual banking system*. Hal ini sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, yakni menyediakan layanan bank umum dan bank syariah sekaligus. BNI Syariah yang didirikan sejak 29 April 2000 membuka layanan 5 (lima) kantor cabang syariah dan 1 (satu) kantor cabang pembantu syariah, dan hingga tahun 2016 BNI Syariah telah memiliki. BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 6331 jaringan ATM BNI, 21.143 ATM link dan 30.794 ATM bersama, serta fasilitas *phone banking* 24 jam.

BNI Syariah Makassar dibuka pada tahun 2001 bersama dengan kantor cabang lain di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung dan Padang. Keputusan BNI untuk membuka divisi usaha syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan pasar. Hal ini ditunjang dengan landasan hukum yang jelas dan kondisi yang memungkinkan pengalaman BNI beroperasi sebagai bank umum konvensional selama lebih 50 tahun. Selain itu, didukung pula dengan orang yang kapabel dan berkompeten di bidang syariah Islam yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi Bank Negara Indonesia untuk memberikan pelayanan syariah karena adanya peluang bisnis yang besar. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah dengan sebaik-baiknya. Kedua, dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syariah, diharapkan Bank Negara Indonesia dapat memaksimalkan return sehingga dapat meningkatkan kinerja BNI Syariah secara keseluruhan. Namun demikian, dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun sistem akuntansinya sama sekali terpisah dengan BNI Konvensional yang melakukan kegiatan perbankan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga agar kegiatan usaha BNI syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Menjadi bank syariah yang menguntungkan bagi Bank Negara Indonesia dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadis.¹

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah

¹ Arsip Bank BNI Syariah Kota Makassar

- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Budaya Kerja BNI Syariah

a. Amanah

- 1) Jujur dan Tepati Janji
- 2) Bertanggung Jawab
- 3) Bersemangat untuk Menghasilkan Karya Terbaik
- 4) Bekerja Ikhlas dan Melaksanakan Niat Ibadah
- 5) Melayani Melebihi Harapan

b. Jamaah

- 1) Peduli Berani Memberi Maupun Menerima
- 2) Umpan Baik Yang Konstruktif
- 3) Membangun Sinergi Secara Profesional
- 4) Memahami Keterkaitan Proses Kerja
- 5) Memperkuat Kepemimpinan yang Efektif

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau kerangka yang menunjukkan segenap fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dimasukkan untuk memungkinkan adanya koordinasi antara semua satuan dan jenjang utama dalam pengambilan keputusan.² Pada struktur BNI Syariah yang mengawasi produk dan layanan syariah agar tidak

² Arsip Bank BNI Syariah Kota Makassar

menyimpang dari prinsip syariah dilakukan oleh dewan pengawas syariah yang dibentuk oleh setiap bank syariah dan wajib dimasukkan dalam struktur organisasinya. Tugas Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan aktif maupun pasif secara periodik dan memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan syariah
- b. Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur dan Komisariat mengenai perkembangan produk dan kegiatan usaha syariah
- c. Menyiapkan laporan hasil pengawasan kepada komisaris utama dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dengan tembusan kepada Bank Indonesia sekurangngnya satu kali dalam setahun.
- d. Merumuskan hal yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank BNI Syariah dipimpin oleh seorang pemimpin divisi usaha syariah dan dua orang wakil pemimpin divisi. Pada struktur organisasi bank BNI, pemimpin divisi usaha syariah bersama divisi usaha kecil menengah berada di bawah pengawasan direktur komersial.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan struktur organisasi BNI Syariah Cabang Makassar secara lengkap sebagaimana terlampir

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di A.P.Pettarani Komp Ruko Jade No.1, Kec.Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun letak lokasi secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 4.1 Peta Lokasi Penelitian



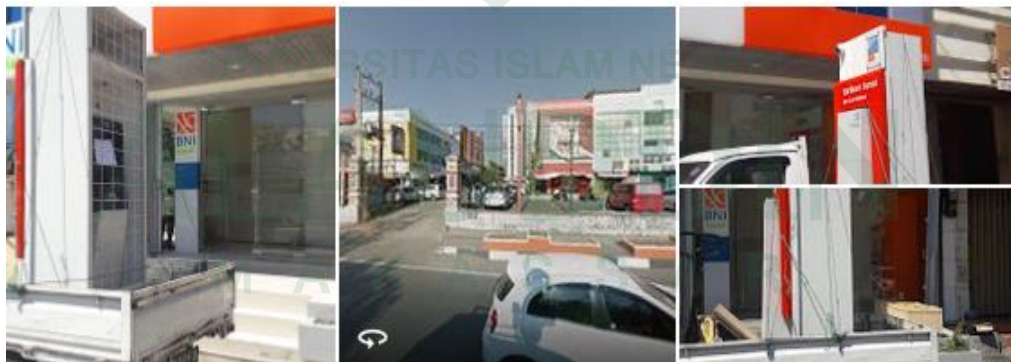
Sumber : <https://www.google.co.id/search?>³

Alamat: Ruko jade no 1, 90222, Jl. A. P. Pettarani, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Jam buka: Sudah mau tutup · 08.00–16.00 ▾

Provinsi: Sulawesi Selatan

Gambar. 4.2 Peta Lokasi Penelitian



Sumber : <https://www.google.co.id/search?>⁴

³ <https://www.google.co.id/search?>

⁴ <https://www.google.co.id/search?>

B. Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang insya Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.

Operasional awal, pihak bank BNI Syariah mengerahkan tim marketing atau kampasing dalam menawarkan produk iB Hasanah Card pada tiap kantor, perusahaan, maupun individu. Kemudian arus bisnis dari Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak issuer bank yang dalam hal ini adalah BNI Syariah. Dilanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses *scoring/verifikasi* telah selesai dilaksanakan maka proses *approval* adalah langkah berikutnya.

Adapun syarat umum pemohon untuk mendapatkan aplikasi iB Hasanah Card membawa dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk di *approve/disetujui* antara lain :

- a. Fotocopy KTP
- b. Bukti penghasilan/Slip gaji
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Informasi tersebut dijelaskan dan dipertegas oleh koordinator divisi Syariah Card Bapak Muhajirin.

“...Persyaratan tersebut berlaku untuk semua pemohon yang mengajukan, kemudian melakukan tanda tangan diatas aplikasi iB Hasanah Card (kartu)...”⁵

TABEL 4.1

Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp 60 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Hasanah Platinum	Rp 500 Juta / Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku			

Sumber : Bank BNI Syariah⁶

Setiap tahunnya anggota atau nasabah iB Hasanah Card mengalami fluktuatif, pada tahun 2016 pemohon yang mengajukan untuk penggunaan iB Hasanah Card sebanyak 1000 in-coming namun itu masih terhitung aplikasi kotor, selanjutnya akan diproses dan diverifikasi dari kantor pusat kemudian ke kantor cabang. Jika nasabah

⁵Wawancara dengan informan praktisi Bapak Muhajirin (Kordinator Kartu Kredit Syariah), 31 Oktober 2017

⁶Sumber: Bank BNI Syariah

memenuhi kriteria barulah kartu iB Hasanah Card diaktifkan. Untuk tahun 2016 sekitar 200 aplikasi yang aktif untuk wilayah Kota Makassar.

Telah dijelaskan pada paragraf awal dalam Produk iB Hasanah Card, menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa, dan dijelaskan dalam tabel 4.2 :

TABEL 4.2
Akad iB Hasanah Card

Akad Kafalah	BNI Syariah sebagai penerbit kartu dan merupakan penjamin (kafil) bagi pemegang kartu iB Hasanah Card terhadap <i>Merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu iB Hasanah Card dengan Merchant. selain Bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan biaya <i>Monthly Membership Fee</i>
Akad Qardh	BNI Syariah adalah pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada pemegang kartu iB Hasanah Card (<i>muqtaridh</i>) atas seluruh transaksi penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Cash Advance Fee</i> (biaya penarikan tunai)
Akad Ijarah	BNI syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan <i>annual membership & monthly membership fee</i>

Sumber : Bank BNI Syariah⁷

Akad yang diterapkan pada Hasanah Card adalah akad kafalah, ijarah dan qard. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Dalam Hasanah Card semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya.

Misal akad Qardh digunakan pada saat tarik tunai di ATM, Qardh merupakan akad utang piutang, dalam akad ini berapapun jumlah uang yang dipinjamkan itu yang akan dikembalikan dari pihak nasabah tanpa ada penambahan bunga ataupun pengurangan dari pokoknya. Pengenaan biaya pada transaksi tarik tunai hanya dikenakan biaya administrasi fungsi dari atm, biaya sudah ditentukan di awal pada saat penandatanganan aplikasi dan ini bukan termasuk riba. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000 akan tetapi biaya ini bukan diperuntukkan kepada pihak bank BNI Syariah melainkan diterima oleh pihak ATM atau CIRRUS yaitu vendor dari ATM.

Menurut Bapak Ade Setiadi selaku *Funding Officer* di Bank BNI Syariah Kota Makassar.

“....akad inilah yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, bedanya kartu kredit konvensional, mereka bungakan, berapa uang yang ditarik, itu yang mereka bungakan, penetapan bunga biasanya mencapai 2,95%, sedangkan Hasanah Card tidak memberlakukan hal serupa. Ketika nasabah melakukan transaksi penarikan sebanyak 1 juta, maka jumlah yang harus dikembalikan sama dengan besar jumlah yang dipinjam sebanyak 1 juta....”⁸

⁷Sumber: Bank BNI Syariah

⁸Wawancara dengan informan Praktisi Bapak Ade Setiadi (Funding Officer BNI Syariah Kota Makassar), 31 Oktober 2017

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada iB Hasanah Card sejalan dengan teori Maslahah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, dimana pada penerapannya Bank BNI Syariah murni untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dari penarikan tunai meskipun tidak mengambil keuntungan atau imbalan dari proses tersebut, karena pada dasarnya kemaslahatan menekankan untuk mendahulukan sesuatu yang asalnya baik dan meniadakan kemudharatan. Namun realita pada Bank Konvensional kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Jika pada Bank Konvensional terdapat Bunga yang artinya hal tersebut bertentangan dengan *syara*’ yang akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak, itu tidak dibenarkan. Karena sebab yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara*’, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁹

Pada dasarnya bunga yang diterapkan dalam Bank Konvensional termasuk kategori Riba *dayn* yang berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Pada

⁹Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath* 12, No.1. (Desember 2013), hal.291

tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan pada QS.Ar-Rum/30:39 yang berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ ۙ لَّيَّرَبُّوٓا۟ فِيۢ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍۭ
تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَٔٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).¹⁰

Berdasarkan Ayat tersebut operasional Bank Syariah dikatakan sesuai karena menurut akad Qardh karena tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang-piutang.

Begitupun dengan akad ijarah bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan atas kerjasamanya dengan merchant. Dengan akad kafalah bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul. Dari ke dua akad inilah pihak bank mendapatkan keuntungan yang disebut ujah atau biaya sewa.

C. Mekanisme Biaya Tadwidh Biaya Keterlambatan dan Penetapan Biaya iB Hasanah Card

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009)

insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee* atau potongan biaya bulanan telah ditetapkan diawal. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atau bisa dikatakan pada saat nasabah beretiket baik dalam melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal *monthly fee* adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu. Setiap nasabah berhak mendapatkan *Cash Rebate*, *Cash Rebate* dapat berkurang sesuai dengan proporsi pembayaran nasabah, namun tidak akan mengalami kenaikan. Besarnya presentase *Cash Rebate* tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah, penetapan *cash rebate* dilakukan dan dihitung melalui sistem.

TABEL 4.3
Net Monthly Fee

Contoh perhitungan *Net Monthly Fee*:

	Keterangan	Nilai (Rp)
A	Limit Kartu	Rp 10.000.000,-
B	Monthly Membership Fee	Rp 225.000,-
C	Pengguna Kartu	Rp 1.000.000,-
D	Payment	Rp 100.000,-
E	Outstanding Rafter Payment	Rp 900.000,-
F	Cash Rebate*	Rp 168.350,-

G	Not Monthy Membership Fee	Rp 56.650,-
---	---------------------------	-------------

Sumber: Bank BNI Syariah¹¹

Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang ke dua adalah iuran tahunan (*annual membership fee*) biaya tersebut juga telah ditentukan diawal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan diawal akad. Namun ada beberapa pihak atau anggota nasabah yang tidak dikenakan iuran tahunan, yaitu pihak instansi atau perusahaan yang diajak bekerja sama dengan BNI Syariah. Pihak tersebut dimaksudkan adalah nasabah prioritas, khusus nasabah prioritas pihak bank menganggap hal tersebut merupakan gift atau hadiah. Untuk di wilayah Makassar sendiri instansi yang melakukan kerja sama dengan Bni Syariah dan termasuk sebagai nasabah prioritas adalah Universitas Negeri Alauddin Makkassar, beberapa BUMN dan juga perusahaan Pertamina. Penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah atau pemegang kartu akan masuk pada kas pendapatan operasional Bank

Baik Hasanah Card maupun kartu kredit reguler mempunyai persamaan dalam hal pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa provider Inernasional, yaitu MasterCard International, dan nasabah dikenakan biaya iuran tahunan.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya biaya tadwidh atau dalam dunia perbankan khususnya Bank BNI Syariah diistilahkan sebagai biaya denda keterlambatan. Pada dasarnya biaya tadwidh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya

¹¹ Sumber :Bank BNI Syariah

nominal biaya tadwidh ditentukan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.¹²

Pada prakteknya, Penerapan biaya keterlambatan pada BNI Syariah dalam aplikasi iB Hasanah Card , dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara harian atau dengan kata lain biaya tadwidh ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dai 0-6 hari, kemudian 14 hari dst, selama si nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan biaya denda akan terus meningkat. Menurut dewan direksi BNI Syariah Kota Makassar memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan.

Menurut Bapak Ade Setiadi salah satu karyawan BNI Syariah :

“...biaya denda keterlambatan peruntukannya tergantung dari kebijakan divisi cabang, cabang yang memperoleh dan yang menagih, orang pusat tidak peduli dengan hal seperti itu. Akan tetapi jika ada rekanan, yayasan, atau nasabah yang memiliki panti asuhan atau lembaga zakat pihak dari kantor akan segera menyettor kesana, atau memasukkan pada yayasan Hasanah titik...”.¹³

Hal tersebut menerangkan bahwa pendapatan yang diterima dalam hal ini biaya denda peruntukannya adalah sebagai dana sosial, yang disalurkan ke lembaga atau yayasan yang dibentuk oleh pihak Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Titik, bukan sebagai pendapatan operasional bank.

¹²Azharsyah Ibrahim, *Kredit dalam Hukum Syariah (Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya*, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010) hal.12

¹³Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Ade Setiadi (Funding Officer), 31 Oktober 2017

Akan tetapi, penerapan tersebut sudah diberhentikan sejak satu tahun terakhir menurut informasi dari Bapak Ade Setiadi, dikarenakan adanya pertimbangan dari dewan direksi, diantaranya:

- a. Dari sudut pandang bisnis tidak ada profit yang bisa dikoleksi
- b. Dari pihak bank membuang-buang waktu menghitung apalagi memusingi denda
- c. Memberatkan kepada pihak nasabah

Berdasarkan hal ini penagihan biaya tadwidh atau denda keterlambatan yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pihak dewan direksi telah mengeluarkan kebijakan meskipun DPS membolehkan hal tersebut.

Adapun langkah yang dihadapi pihak BNI Syariah, pada saat nasabah atau pengguna kartu yang terlambat dan menunggak dalam pembayaran, akan dikenakan SP 1 ini dikenakan pada waktu 1 minggu nasabah terlambat membayar, kemudian bulan ke 2 akan diberikan teguran melalui surat peringatan ke 2 dan panggilan telepon. Bapak Ade Setiadi mengatakan:

“...surat peringatan yang dikirim kepada nasabah akan dilampirkan ayat-ayat, ini merupakan bentuk kesyariahan dari pihak kantor yang membedakan dari bank konvensional, sebagai pihak yang berwenang juga mengingatkan bahwa hukum membayar hutang adalah wajib...”¹⁴

Bapak Muhajirin salah satu Koordinator kredit pada Bank BNI Syariah KCP Petrtarani mengatakan bahwa :

“...hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, pihak syariah memang harus membuat jati dirinya sendiri contoh misalnya dalam hal penagihana kami telah meberhentikan dan tidak menggunakan denda,

¹⁴Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Ade Setiadi (Funding Officer), 31 Oktober 2017

melainkan kami menagih dengan memberikan ayat-ayat lewat surat teguran atau email, bahwa memang kewajiban membayar hutang hukumnya wajib atau *fardhu*...”¹⁵

Kemudian jika bulan ketiga sama sekali tidak ada respon dari nasabah, dinyatakan kredit macet atau over limit, pihak BNI Syariah akan menon-aktifkan aplikasi dan penghapusan buku. Pihak BNI Syariah tidak menyediakan *Debt Collector*, langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan jalur hukum yaitu pelelangan akan tetapi sistem yang digunakan adalah sistem keadilan, yang mana pihak bank hanya mengambil sisa pokok pembiayaan, *margin*/keuntungan tidak akan dihitung lagi, jika ada sisa dikembalikan kepada pihak nasabah.

Landasan utama dan Dasar BNI Syariah Kota Makassar masih tetap bertahan menerapkan eksistensinya pada produk syariah Card, menilik bahwa Bank syariah lain menolak dan memberhentikan aplikasinya, dengan alasan, Pihak BNI Syariah berusaha mengkaji agar sistem yang diterapkan sesuai dengan syariah.

Bapak Ade Setiadi berpendapat bahwa
 “...Keunggulan dari Hasanah Card, Jika orang memilih untuk bersyariah satu-satunya pilihan adalah BNI Syariah sebab produk yang kami tawarkan masih unggul dibanding dari Bank lain, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat terkhusus umat muslim untuk berhijrah...”¹⁶

BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan iB Hasanah Card. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba,

¹⁵Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Muhajirin (Koordinator IB Hasanah Card) , 31 Oktober 2017

¹⁶Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Ade Setiadi (Funding Officer), 31 Oktober 2017

gharar dan israf. Pihak Bank berpendapat adanya kartu kredit Syariah menjadi sebuah pilihan tepat bagi umat muslim di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya untuk solusi berbelanja bijak dengan menggunakan kartu kredit yang berlandaskan syariah.

D. Bentuk Kerjasama antara BNI Syariah dengan MasterCard

BNI Syariah sebagai bagian dari PT. BNI (Persero) Tbk, yang telah lebih dulu bekerjasama dengan MasterCard yang menerbitkan kartu kredit BNI. Dalam menerbitkan Hasanah Card, BNI Syariah melanjutkan kerjasama dengan MasterCard yang merupakan penyedia "*brand*" dan jaringan. Dalam proses penerbitan kartu kredit, sebuah bank diharuskan melakukan kerjasama dengan sebuah provider kartu kredit.

Dalam menerbitkan Hasanah Card, BNI Syariah bekerjasama dengan MasterCard sebagai provider jaringan sama seperti kartu kredit konvensional. BNI Syariah perlu meminta nomor bank atau Bank Identification Number (BIN) yang berjumlah 6 digit kepada MasterCard sebagai bukti bahwa BNI Syariah telah bekerjasama dengan MasterCard. Hal ini dikarenakan BNI Syariah hanya meneruskan kerjasama yang sudah terjalin antara MasterCard dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Hubungan yang terjalin antara BNI Syariah dengan MasterCard hanya sebatas MasterCard sebagai penyedia jaringan transaksi International dan BNI Syariah sebagai salah satu partner kerja dari MasterCard yang menggunakan jasa jaringan International tersebut. Sedangkan perhitungan yang digunakan dalam segala jenis transaksi adalah sesuai dengan sistem kerja dari masing-masing bank, yang dalam hal ini berarti perhitungan yang digunakan BNI Syariah adalah sesuai dengan prinsip syariah. Kewajiban antara bank penerbit kartu terhadap MasterCard hanya

pembayaran tagihan per bulan berdasarkan jumlah kartu beredar atau jumlah transaksi tanpa adanya penambahan beban bunga. Hubungan kerjasama (bermuamalah) dengan pihak MasterCard (konvensional) dimungkinkan selama akad yang digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pembagian keuntungan pihak BNI Syariah dengan pihak provider master card tergantung kesepakatan, tergantung kerjasama dan pembagian nisbah menurut pihak bank 50:50.

Dalam aplikasi Hasanah Card di daerah Kota Makassar dengan Code Mastercard, transaksi tersebut dapat digunakan di merchant manapun, namun tidak digunakan dalam transaksi non syariah yang tidak diperbolehkan. Di daerah makassar sendiri transaksi tidak dapat berlaku seperti di tempat hiburan atau karaoke dan bar, hotel, café yang menjual minuman keras. Segala bentuk produk maupun tempat yang dilarang dalam syariah terdapat kode merchantnya dan tertolak otomatis apabila produk tersebut terdapat unsur keharamannya.

Adapun penjelasan dari Bapak Muhajirin selaku Koordinator Kartu Kredit Syariah mengenai dasar penggunaan Hasanah Card bagi nasabah, mengatakan.

“...Kemampuan bank untuk mengawasi tiap nasabah yang bertansaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan israf atau berlebih-lebihan...”¹⁷

Realita saat ini dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Kedua, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya hidup mewah, dan ini merupakan salah satu teori kebutuhan konvensional yang dianut oleh Abraham Maslow mengenai

¹⁷Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Muhajirin (Koordinator IB Hasanah Card) , 31 Oktober 2017

kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya mencerminkan berbagai simbol-simbol status.¹⁸

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun objeknya, transaksi dapat menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun haram, sehingga memungkinkan bertransaksi tidak sesuai syariah. Namun dengan kemampuan pihak BNI Syariah membatasi pembelanjaan pada produk-produk yang halal saja ini memungkinkan masyarakat untuk tidak berlaku konsumtif atau bermewah-mewahan dalam berbelanja. Prinsip ini adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau atau israf. Menurut bahasa, israf adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Israf juga berarti berlebihan melewati batas. Sedangkan menurut istilah, israf berarti melewati batas dalam hal makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan keinginan yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Allah berfirman dalam (QS Al-Isra'/17: 27) mengenai pelarangan israf sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝ ١٧

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra'/17: 27).¹⁹

Pada praktek di kartu konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan, sehingga card holder dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Meskipun dalam

¹⁸Sarlito W. Sarwono. *Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) hal.174-178

¹⁹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, *AL-QuranulKarim* (Bandung : PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 284

penerapannya syariah card membatasi pagu maksimal pembelajaan, akan tetapi pihak bank juga belum sepenuhnya mampu untuk membatasi segala tindakan pengeluaran nasabah setiap bulannya, pada dasarnya pihak bank menganggap bahwa syariah card muncul sebagai alat pemuas kebutuhan dikatakan salah satu karyawan bank BNI Syariah, menurutnya dalam memasarkan hasanah card ditekankan orang yang memakai kartu kredit untuk tujuan konsumtif, karena orang yang memiliki banyak uang tidak akan bertransaksi dengan syariah card apalagi berhutang. Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan teori yang ada tidak sejalan dengan konsumsi islam, hal tersebut pula yang mendasari profesor di IIUM Malaysia Daud Bakar, serta pimpinan DPS Sulbar Prof Halide mengatakan bahwa kartu kredit apapun jenisnya tidak sebaiknya diberlakukan karena sesuai pernyataan dari pihak bank hal tersebut sebenarnya menganjurkan masyarakat berhutang dan belaku konsumtif.²⁰ Karena tidak sedikit pula nasabah yang mengalami over limit atau kredit macet.

Tiap Bank memiliki cara marketing masing-masing untuk meyakinkan nasabah agar tertarik menggunakan produknya, Bank BNI Syariah Kota Makassar juga menerapkan hal tersebut, seperti halnya berkerja sama dengan beberapa merchant memberikan promo atau diskon, seperti tahun kemarin pihak bank BNI Syariah bekerja sama dengan Restoran Solaria, nasabah yang datang akan diberikan potongan jika menggunakan kartu Hasanah Card, kemudian tahun ini Mcd masih memberlakukan promo, juga ada beberapa hotel syariah, dan agent perjalanan wisata dengan perjalanan syariah yaitu umrah atau haji, nasabah bisa mendapatkan diskon dengan memakai kartu kredit tersebut. Begitupun dengan berbagai fitur yang disediakan dalam iB Hasanah card diantaranya *Smart spending*, *Dana plus*, dan

²⁰ Deno arisandi, *Kartu Kredit Syariah*, <http://kartukreditislam.blogspot.com/> akses 22 Juli 2018

Executive Lounge. Beberapa fitur tersebut terdapat promo yang telah ditentukan langsung dari pihak penerbit kartu untuk dinikmati pemegang kartu diantaranya Smart Spending dimana merupakan layanan cicilan dengan jangka waktu, hal ini dapat membantu nasabah menentukan jangka waktu pelunasan utang sejauh mana mereka mampu melunasinya dengan cicilan nol persen. Kemudian *executive lounge* merupakan pelayanan khusus untuk nasabah prioritas dalam pelayanan penerbangan tanpa mengurangi point dalam syariah card namun ini hanya diperuntukkan kepada nasabah prioritas, dan yang terakhir *dana plus* merupakan untuk melakukan transfer dana dari *Ib Hasanah Card* ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun, yang mana biaya administrasinya tidak diatur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi *danapulus* didasarkan pada perhitungan setiap transaksi senilai Rp.25.000, dengan maksimum penarikan 1.200.000, setiap perhitungan *danapulus* akan diberlakukan Rp.25.000 per 1.200.000.

Hal tersebut menurut pihak dari bank, merupakan biaya administrasi atau fee, atau biaya sewa yang dikenakan dari pihak bank. Namun pada dasarnya ini kembali pada kesepakatan awal. Dimana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan di awal akad.

Dalam peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan lima prinsip. (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. (2) akuntabilitas kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. (3) pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip

pengelolaan bank yang sehat. (4) profesional memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. (5) kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Berdasarkan PBI tersebut diatas, Bank BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan kelima dasar tersebut (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, kewajaran). Dalam segala bentuk penetapan biaya baik itu iuran bulanan, tahunan, maupun biaya administrasi dalam setiap transaksi pihak bank harus benar-benar transparan dalam memberikan penjelasan informasi, agar kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

Peneliti berpendapat dalam hal perhitungan biaya administrasi fitur dana plus, adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya kesepakatan antara nasabah dengan bank. Al-Quran secara jelas menyatakan dalam hal sewa menyewa, harus ada kejelasan dan keridhoan satu sama lain.

E. Sudut Pandang Pihak Akademisi dan Regulator dalam Penerapan Syariah Card di Kota Makassar

1. Sudut Pandang Akademisi

Salah seorang akademisi di bidang keuangan UIN Alauddin Makassar, Ibu Rika berpendapat bahwa

“...Menurut saya kartu kredit dianggap perlu karena melihat zaman sekarang ini sudah sangat mengalami perkembangan, kebijakan yang diterapkan juga sudah banyak yang berubah, contoh di jalan tol saja saat ini sudah menggunakan e-money sewaktu orang mau bayar apa-apa nggak usah bawa

²¹ Bank Indonesia, Penjelasan Peraturan Bank Indonesia NO. 11/33/PBI/2009

cash, ditempel saja kartu kreditnya atau e-money nya kemudian masukkan pin, dan bisa langsung pesan. Masyarakat sebenarnya dituntut untuk berlaku efisiensi. Kenapa BI ngotot mengeluarkan kebijakan yang semua berbasis elektronik, supaya biaya untuk pencetakan uang lebih rendah, kemudian uang beredar dicatat dengan baik dan terecord langsung...”.²²

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa melihat realita perkembangan masyarakat modern saat ini perlakuan terhadap kartu kredit syariah diperlukan, namun menurut pihak akademisi cara bank syariah dalam memberikan kartu kredit harus melihat siapa orang yang sebaiknya diberikan itu penting. Dasar utama mengapa pihak akademisi membolehkan pelayanan produk jasa Syariah Card menurut Ibu Rika.

“...Karena memang Bank Syariah dituntut untuk mempunyai kinerja yang sama dengan Bank Konvensional, dan salah satu alat yang dipakai produk dari bank itu adalah kartu kredit dan pihak BNI Syariah memang harus mengkaji bagaimana caranya agar tidak terkesan mendorong ke arah konsumtif seperti Bank Konvensional...”.²³

Adapun fungsi Syariah Card dari sudut pandang akademisi adalah :

- a. Sebagai alat pengelola keuangan
- b. Sebagai alat pelengkap kebutuhan tetapi bukan keinginan
- c. Membantu meringankan pembayaran atau dengan kata lain menalangi terlebih dahulu pembayaran atau pembiayaan dari masyarakat

Dalam poin-poin tersebut mengandung makna setiap masyarakat terkhusus umat muslim sebaiknya dalam berperilaku konsumen tidak hanya mencari *Utility* maksimum atau memaksimalkan kepuasan materil. Dengan kata lain menghabiskan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki demi untuk memiliki barang yang disenanginya, yang mana ketika seseorang akan merasa puas ketika memiliki banyak

²²Wawancara dengan informan Akademisi (Dosen Keuangan UINAM), 01 November 2017

²³Wawancara dengan informan Akademisi (Dosen Keuangan UINAM), 01 November 2017

barang daripada memiliki sedikit (*more is better*).²⁴ Dalam sudut pandang Perilaku Konsumsi Islam Utilitas bukan sesuatu yang bertentangan dengan maslāhah bahkan dalam Islam seorang Muslim juga harus rasional. Namun, utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka tetapi juga di batasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan.²⁵ Sesuai dengan point ke-dua dari pendapat yang disebutkan oleh Ibu Rika, seseorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai utilitas (kepuasan) maksimal dalam kegiatan konsumsi apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, dimana Kartu Kredit Syariah bukan sebagai alat untuk berbelanja dengan sifat ke arah konsumtif melainkan hanya sebagai alat pembantu pemenuhan kebutuhan bukan pemuas keinginan. Kaidah yang dapat diacu sebagai pedoman dalam berkonsumsi adalah (Q.S Al-Furqan(25):67), sebagai berikut yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ ۝ ٦٧

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S Al-Furqan(25):67)*²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang untuk mencapai kebutuhannya dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Karena kepuasan dan keinginan yang kita harapkan bukan berdasarkan apa yang dikonsumsi

²⁴Muhammad, *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), h. 188.21

²⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 129.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 365.

melainkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yaitu dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan.²⁷

2. Sudut Pandang Regulator

Dalam hal ini pihak regulator adalah pihak yang menyusun aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan. Penetapan hukum berlakunya BNI Syariah mengikuti UU Perbankan, DPS dan Fatwa MUI. Sehingga dalam tulisan ini sudut pandang Ulama MUI juga diperlukan. Menurut salah satu Dewan Pengurus MUI di Kota Makassar tentang pandangannya mengenai penerapan Syariah Card yaitu Bapak Rasyid berpendapat bahwa :

“...Sebagai MUI, tidak ada solusi praktek detail dari tafsir, hadits dan ulama, sehingga praktek tersebut dibolehkan, sepanjang belum ada solusi lain, kartu krdeit syariah merupakan alat untuk membantu masyarakat dalam bertransaksi...”²⁸

Pihak MUI menganggap, hal tersebut merupakan alat atau teknologi kemudahan. Sehingga dibolehkan. Ulama tersebut menunut pada ayat Allah dalam firmannya (QS. Al. Baqarah; 185)

اللَّهِ يُدُّ بِكُمْ الْيُسْرَ يَذِيرُ وَلَا الْعُسْرَ بِكُمْ

Terjemahannya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah; 185)

Kemudian dari Anas in Mali *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

يَسِّرْ أَوْ لَا تُعَسِّرْ أَوْ لَا تُبَسِّرْ وَلَا تُنْقِرْ

²⁷Mustafa Edwain Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,h. 68

²⁸Wawancara dengan informan Regulator (Pengurus MUI dan Tokoh Ulama), 02 November 2017

"....Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari...." (Muttafaq 'Alaih)²⁹

Sehingga menurut Drs.Rasyid sepanjang belum ada solusi yang tepat maka itu diperbolehkan. Pemakaian kartu kredit dianggap lebih aman dibanding membawa uang kas, melihat maraknya tindak kriminal saat ini.

"...Islam menganjurkan kita harus aman, harus cepat dan harus mudah..."³⁰

Mengenai penetapan biaya dan denda yang dikenakan dari pihak Bank, Pihak MUI berpendapat selama pihak nasabah tidak merasa terbebani melainkan tertolong karena adanya produk tersebut itu dikatakan halal dan boleh dalam pemakaiannya, akan tetapi jika nasabah sudah merasa dibebani itu sudah menjadi haram hukumnya. Sebagai bentuk perumpamaan dalam ayat yang dijelaskan oleh Drs.Rasyid mengatakan bahwa

"...siapapun yang meminta tambah adalah riba, hal tersebut belum tentu terjadi, perlu pemahaman dan cara yang berfikir yang tuntas, sehingga islam mampu mengkaji hal-hal demikian. selama kedua belah pihak merasa tidak terbebani dan tidak dirugikan dan dengan dasar senang suka sama suka pernyataan diatas belum tentu dikatakan Riba..."³¹

Adapun mekanisme Syariah Card yang benar Menurut pandangan MUI :

- a. Semakin banyak orang muslim yang menjadi investor sistem kartu kredit syariah semakin mudah diperbaiki

²⁹<http://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2013/03/18/23627/permudahlah-dan-jangan-persulit/#sthash.fNgZfnY0.dpbs>

³⁰Wawancara dengan Informan Regulator (Pengurus MUI dan Tokoh Ulama), 02 November 2017

³¹ Wawancara dengan informan Regulator (Pengurus MUI dan Tokoh Ulama), 02 November 2017

- b. Semakin kurang investor muslim yang menginginkan pola syariah semakin kaku pelaksanaan kartu kredit.

Menurut pihak MUI, keberadaan muslim di Indonesia terkhusus di wilayah Kota Makassar sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian, Banyaknya masyarakat yang menggunakan uang atau modalnya sebagai alat berproduktif dan menginvestasi uangnya ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sesuai landasan syariah, sistem dan pelaksanaan kartu kredit akan semakin mudah berkembang dan meningkat.

3. Sudut Pandang Nasabah atau Pengguna

Selain dari bidang keuangan informan yang terkait juga merupakan pengguna dari kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syariah.

Menurut Ibu Rika fungsi dari kartu kredit dari sudut pandang pengguna.

“...Kartu kredit itu bukanlah sebagai alat utang piutang tetapi hanya alat untuk membantu pengelolaan keuangan seseorang, terlebih lagi apabila telah berumah tangga kartu kredit sangat berfungsi dalam mengontrol dan mengelola manajemen kas keuangan rumah tangga...”³²

Menurutnya Setiap kali apply kartu kredit bukan atas dasar berutang melainkan ada benefit yang diperoleh diantaranya dari diskon ataupun promosi cicilan 0% dan banyak yang dirasakan saat ini *dept store* ataupun pusat perbelanjaan lainnya lebih banyak menerapkan diskon ataupun promo dengan menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan pembayaran tunai dan itu sangat membantu dan memudahkan baginya dalam bertransaksi maupun mengelola keuangannya.

Dari hasil data praktek maupun informasi yang diambil dari beberapa sumber kemudian dikaji dan dikaitkan dengan teori yang ada, keberadaan kartu kredit syariah

³² Wawancara dengan Informan Akademisi (Dosen Keuangan UINAM), 01 November 2017

dianggap telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan, meskipun sebelumnya pernah menerapkan perlakuan yang berbeda namun telah dihentikan. Menurut pendapat beberapa pihak Syariah Card dianggap perlu karena memudahkan transaksi, efisien dan aman untuk dibawa, kemudian membantu mengelola keuangan, sepanjang nasabah mampu mengontrol dirinya untuk tidak berlaku konsumtif atau israf, dan mengaplikasikannya sesuai jalur syariah berdasarkan al'Quran dan Hadits. Adapun temuan kesesuaian prinsip syariah pada aplikasi iB Hasanah Card di BNI Syariah dapat dilihat pada tabel 4.4.

TABEL 4.4

**Temuan Pembahasan Kesesuaian Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa Dengan
Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card Bank BNI Syariaah**

No	Prinsip Syariah dan Mekanisme Fatwa DSN/MUI No.54/X/2006	Mekanisme Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah	Ket
1	Tidak adanya tambahan atau penetapan bunga (Riba)	Pada transaksi akad Qardh (utang-piutang) yaitu pinjam atau transaksi tarik tunai di ATM tidak ditetapkan bunga dari pokok pinjaman. Administrasi dikenakan Rp. 25.000 per transaksi namun pendapatan non bank melainkan vendor ATM karena menurut pihak bank Vendor ATM juga mempunyai biaya operasional yang dikeluarkan terhadap mesin ATM	Sesuai
2.	Iuran Keanggotaan, akad <i>ijarah</i> . penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (<i>rusum al-udhwiyyah</i>) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai biaya sewa atau imbalan atas isin penggunaan fasilitas	<i>Annual mebership fee</i> dan <i>monthly membership fee</i> (iuran tahunan dan bulanan) diterapkan pihak bank BNI Syariah sebagai biaya keanggotaan dan biaya sewa masa perpanjaangan kartu	Sesuai
3	Akad <i>Kafalah</i> , penerbit kartu	Penerbit kartu Bank BNI Syariah memperoleh	

	boleh menerima <i>fee</i> atau keuntungan dari pemegang kartu atas pemberian <i>Kafalah</i>	keuntungan atau <i>fee</i> dari pemegang kartu atau anggota nasabah atas pemberian jaminan dari kerjasama dengan merchant.	
3	Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (<i>israf</i>)	Pihak bank menentukan limit pagu terhadap kemampuan nasabah, namun pada prakteknya pihak bank belum sepenuhnya mampu untuk membatasi pengeluaran nasabah, pihak bank tidak mengklasifikasikan kemampuan setiap nasabah dalam membayar hutang. Sehingga masih banyak dari pihak nasabah yang mengalami <i>ver limit</i> atau kredit macet. karena pada realitanya pihak bank menyatakan bahwa keberada syariah card untuk keperluan konsumtif masyarakat atau nasabah.	Belum sesuai
4	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, adanya kejelasan dalam bertransaksi (<i>gharar</i>)	Batasan Logo MasterCard dalam membatasi transaksi non-syariah	Sesuai
5	Tidak diatu dalam fatwa mengenai fitur yang berlaku	Biaya administrasi dari fitur <i>danaplus</i> yang didasari besarnya dari nilai transfer atau transaksi sebesar Rp.25.000 per minimum transaksi, yang ketentuannya dijelaskan di awal akad pada saat nasabah ingin melakukan transaksi tersebut	Belum sesuai
6	Denda Keterlambatan/ Biaya <i>Tadwidh</i> , Penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya riil kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu	Dulu ada dan diakui, namun perhitungan denda keterlambatan atau biaya <i>tadwidh</i> berdasarkan hari atau jangka waktu keterlambatan pembayaran si nasabah, berbeda dengan yang ditetapkan fatwa, namun penerappan ini telah dibekukan sejak satu tahun terakhir	Sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank BNI Syariah Kota Makassar pada umumnya sudah menjalankan operasional *Ib Hasanah Card* sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek *riba*, *gharar* dan *israf*. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkordinir pengeluaran anggota nasabah sehingga masih banyak yang mengalami *over limit* atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan *pagu maksimal*, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar keberadaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.
2. Untuk menghindari praktek *riba*, BNI Syariah tidak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang, dan akan menonaktifkan *Hasanah Card* bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, serta menghapuskan biaya denda yang sama diberlakukan oleh pihak bank konvensional, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari praktek *israf* BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan *pagu maksimal* pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkordinir pengeluaran anggota nasabah sehingga

masih banyak yang mengalami over limit atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar keberadaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.

3. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya. Mereka menganggap kartu kredit syariah dianggap perlu di era teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini sepanjang berada di jalur yang sesuai dengan syariah. Pihak akademisi dan regulator menganggap Syariah Card adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantu mengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menganakan uang tunai.

B. Saran

Hasanah Card sebagai kartu kredit dengan prinsip Syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar BNI Syariah dapat selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap lebih perlu meningkatkan pengkajian terhadap aplikasi sehingga kualitas hasanah Card tidak melenceng dari prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Ahmad. 2010. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Atkinson, Rita. Atkison, Richard. 1982. *Pengantar Psikologi*. Erlangga: Jakarta
- Baalbaki, Munir. 2006. *Kamus AlMaurid*. Halim Jaya: Surabaya
- Bachtiar, Hasnan. 2009. *Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*. Ulumuddin 4
- Basyir, Azhar, Ashari. 2000. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press: Yogyakarta
- Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Denzim. Lincoln. 1994. *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publication. Thousan oaks: London.
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya. 2009. *AL-QuranulKarim*. PT Sygma Examedia Arkanleema: Bandung
- Fauzia, Yunia, Ika.Dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Kencana: Sidoarjo
- Ghozali dan Chariri, 2017. *Teori Akuntansi*. BadanPenerbit UNDIP: Semarang
- Haetami, Enden. 2015. *Perkembangan Teori Maslahah "Izzu al-Din Bin Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Asy-Syari'ah
- Hidayat, Ganjar. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Jogjakarta
- Ibrahim, Johanes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Refika Aditama: Bandung
- Ibrahim, Azharsyah. 2010. *Kredit dalam Hukum Syariah (Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya)*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh

- Indriantoro, Nur. Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- Johannes, Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. PT Refika Aditama: Bandung
- Kahf, Mozer. Dkk. 2010. *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. PT. Aqwam Media Profetika: Solo
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Majalah Modal. 2003.edisi No. 8/1
- Majalah Sharing. 2007.edisi 10 thn I
- Modal, 1 Juni 2003: 9
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Mizan Publika: Bandung
- Muhammad, 2005. *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*. BPFE: Yogyakarta
- Muis, Hidayat. 2012. *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI/vii/2004 Tentang Ta'widh pada Pembiayaan mudharabah di PT Syariah Bukopin, Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Mustofa, Azmi, Ulul. 2015. *Syariah Card Perspektif Al Maqashid Syariah*. Jurnal. Vol. 01.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta: Jakarta
- Nasution, Edwain, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jurnal.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Qadarwi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
- Reksoprayitno, Soediyono. 2002. *Pengantar Ekonomi Makro*. BPFE: Yogyakarta
- Republika. 2011. *Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah*.

- Santosa, Edi. 2008. *Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah. Skripsi.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Sarwono, Sarlito. 2002. *Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi.* Bulan Bintang: Jakarta
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan. Skripsi.* Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia: Jakarta
- Silvia, Desti. 2004. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penentuan Biaya (Fee) Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung. Skripsi.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Bandung
- Sjahdeini, Rey, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya.* Prenadamedia Group: Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar.* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Susilo, Sri, Y. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Salemba Empat: Jakarta
- Sutisna. 2003. *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran.* PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung
- Ushwa, Nurul. 2016. *Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah. Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- Usman, Husain. Akbar, Purnomo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial,* Jurnal cet. IV: PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Walgito, Bimo. 1994. *Psikologi Sosial.* Andi Offset: Yogyakarta
- Winarno, Surakhmad. 1982. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran.* Tarsito: Bandung
- W.Lawrence, Neuman. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia. PT. Indeks: Jakarta

Zuhdi, Harfin, Muhammad. 2013. *Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. Jurnal. Istinbath* 12

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-dan-perbankan-syariah-gelar-expo-ib-vaganza-2015>

<http://www.google.pk.esinteraktif.com/>

<http://kartukreditislam.blogspot.com/>

<http://www.muamalatbank.com/>

<http://riuisme.wordpress.com>

<http://www.bni.co.id/Portals0/DocumentPress%20release%20%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind.pdf>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku-konsep.html>



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pimpinan PT. Bank BNI Syariah Kota Makassar

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BNI Syariah Capem Pettarani ? (visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi)
2. Apa saja produk-produk layanan jasa BNI Syariaiah ?
3. Bagaimana mekanisme operasional ib hasanah card pada Bank BNI Syariah ?
4. Dalam produk hasanah card akad apa saja yang dipakai dalam pelayanannya ? apa ojek dari ketiga akad tersebut ?
5. Apa yang membedakan antara kartu kredit konvensional dengan syariah card
6. Bagaimana analisis penggunaan hasanah card dalam perspektif syariah ?
7. Apakah ada biaya yang dikenakan kepada setiap nasabah ketika mengalami keterlambatan membayar ?
8. Bagaimana mekanisme atau implementasi pengelolaan biaya tadwih atau biaya keterlambatan ?
9. Apakah ada denda yang dikenakan iB hasanah card dalam kasus over limit?
10. Bagaimana langkah yang diatasi oleh pihak bank dalam menangani nasabah yang terlambat membayar ? samakah perlakuan antara nasabah yang terlambat membayar beberapa bulan dengan yang telah over limit atau kredit macet ?
11. Seperti yang diketahui bahwa code ib hasanah card adalah logo dari mastercard, sama dengan kartu kredit konvensional dalam melakukan transaksi harus berada pada merchant yang mempunyai logo tersebut, lantas apa yang membedakan antara keduanya ? bagaimana bentuk kerjasama antara pihak bank dengan provider master card tersebut ?

12. Bagaimana dan sejauh mana iB Hasanah Card membatasi transaksi non Syariah (haram) ? merchant apa saja yang dibolehkan transaksinya di daerah makassar ?
13. Bagaimana pembagian keuntungan antara pihak bank dan pihak provider mastercard?
14. Dalam setiap tahunnya mencapai angka berapa orang setiap nasabah yang mendaftar sebagai anggota syariah card? Apakah nasabah yang mendaftar untuk menjadi anggota mengalami fluktuatif atau meningkat setiap tahunnya ?
15. Berapa banyak jumlah nasabah kartu kredit syariah sampai saat ini ?
16. Melihat bahwa produk penyaluran dana paling unggul di bni syariah adalah hasanah card, apa keunggulan dari produk tersebut dibanding produk penyaluran dana lainnya? Dan apa kelemahan dari hasanah card ?
17. Apa yang menjadi dasar atau landasan utama pihak bank bni syariah memberikan produk layanan jasa kredit card kepada masyarakat ? melihat realita bank syariah lain masih belum membuka atau menerapkan produk kartu kredit syariah, dan pihak dari BNI Syariah masih mempertahankan eksistensinya dalam produk pelayanan jasa kredit card tersebut
18. Apa pengertian cash rebate. Dan bagaimana perhitungan net monthly membership fee, dan Bagaimana cara mengatasi nasabah yang terlambat membayar month fee ?

B. Pihak Akademisi (Dosen Ahli Ekonomi Islam)

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu selaku akademisi ekonomi islam atau keuangan islam dalam menyikapi adanya aplikasi kartu kredit syariah dalam hal ini ib hasanah card BNI syariah?
2. Melihat realita yang mana kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks, apakah sebagai pihak akademisi ekonomi islam di bidang keuangan syariah memunculkan atau menerapkan syariah card dianggap perlu ?
3. Apa yang menjadi dasar atau landasan utama menurut bapak/ibu selaku pihak akademisi dalam membolehkan pelayanan produk layanan jasa kredit card kepada masyarakat ?
4. Apakah ada alternatif lain yang bisa memiliki peran yang sama dengan syariah card dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ?

C. Pihak Auditor (DPS-MUI/Ulama)

1. Bagaimana mekanisme syariah card yang benar menurut DSN/MUI
2. Bagaimana tanggapan DSN/MUI mengenai perhitungan biaya tadwidh atau ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak BNI Syariah (perhitungan berdasarkan hari bukan rincian biaya rii)
3. Apa yang menjadi dasar atau landasan utama menurut dsn-mui dalam kebolehan pelayanan produk layanan jasa kredit card kepada masyarakat ?
4. Bagaimana tanggapan DSN-MUI pada keterbatasan Ib Hasanah Card dalam membatasi transaksi non syariah ?

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Gambar 1.1 : Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Muhajirin
(Kordinator Kartu Kredi Syariah di BNI Syariah)**



**Gambar 2.1 : Wawancara dengan Informan Praktisi Bapak Ade Setiade
(Funding Officer di BNI Syariah)**

RIWAYAT HIDUP



Nurwulandari. M, lahir di Parepare pada tanggal 8 November 1995. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan H. Mahmud dan Hj. Nikma Husain. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 35 Parepare 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam dan menyelesaikan studi akhir di tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R